



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 393 /RB.06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Wali Kota Balikpapan**

di

Balikpapan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020 adalah **67,33** dengan kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,54
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,22
	III. Reform	30,00	15,13
	Total Komponen Pengungkit	60,00	34,89
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,03
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,02
	Total Komponen Hasil	40,00	32,44
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,0	67,33

2. Berikut hasil antara dari masing-masing *leading sector* yang telah diterima oleh Kementerian PANRB:

No.	Hasil Antara	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	90 (Memuaskan)	ANRI
2.	Indeks Profesionalitas ASN	68 (Rendah)	LKPP
3.	Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	BPKP
4.	Kapabilitas APIP	Level 3 (<i>Integrated</i>)	BPKP
5.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan	83,19 (Tinggi)	Ombudsman RI

3. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi;
4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
- Tim reformasi birokrasi sudah dibentuk, namun belum menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang disusun. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil pelaksanaan kegiatan. Serta belum disusunnya rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan sasaran perubahan yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya serta target yang jelas dan terukur;
 - Kemampuan asesor Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan evaluator TPN;
 - Pimpinan tinggi belum sepenuhnya terlibat secara aktif dalam pelaksanaan RB serta belum maksimalnya peran dari agen perubahan dalam melakukan perubahan budaya kerja dan perubahan mindset sehingga belum terlihat perubahan nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kota Balikpapan;
 - Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya disusun;
 - Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan menyeluruh;
 - Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD;

- g. Penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya *Grand Design* pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi yang belum terintegrasi;
 - h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
 - i. Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun aplikasi SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) serta monitoring capaian kinerja (*e-SAKIP*), namun pengintegrasian yang ada belum sempurna, sehingga pemanfaatannya pun belum maksimal;
 - j. Implementasi atas kebijakan penguatan pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih belum sepenuhnya efektif;
 - k. Peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* masih belum optimal;
 - l. Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2020 belum berhasil menambah unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - m. Belum optimalnya Implementasi pelayanan publik khususnya di PD yang memiliki layanan langsung ke masyarakat dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
5. Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 68,68 dengan kategori Baik (B) tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019;
 - b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan hasil.

No	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survei Eksternal Persepsi Kualitas Pelayanan	3,42	3,43
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,56	3,61

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan sedikit kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan;

2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan sistem integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi.

c. Hasil Survei Integritas Jabatan terhadap 100 responden yang diambil dari



pegawai Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan **indeks 3,32** dari skala 5. Secara keseluruhan, hanya 25% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 75% responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran kinerja, atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim reformasi birokrasi internal melalui pertemuan berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya hingga ke PD;
2. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB;
3. Meningkatkan peran agen perubahan di setiap perangkat daerah untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya dan membangun *social control* antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
4. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan;
5. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya

peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;

6. Menyusun peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD;
7. Meningkatkan optimalisasi penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan menyusun *Grand Design* pengembangan SPBE serta pengintegrasian beberapa aplikasi;
8. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *HCDP* secara menyeluruh dan memetakan *talenta/talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritis dan rencana suksesi jabatan;
9. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang terintegrasi di seluruh PD yang merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis *outcome*;
10. Mengefektifkan implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, *Whistleblowing System* pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan SPIP;
11. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*;
12. Meningkatkan pembangunan zona integritas secara masif sebagai salah satu upaya dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
13. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat PD dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada *stakeholder* serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Kami menghargai upaya Wali Kota Balikpapan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.